

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

LAPORAN KEUANGAN
**OPD DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN
2019

Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam

Kec. Bukit Intan

Pangkalpinang 33418

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi wajib menyusun Laporan Realisasi Tahunan APBD yang dikelolanya dan Laporan Keuangan Tahunan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun Laporan Keuangan tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan semester I Tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual dan menggunakan aplikasi SIMDA sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Juli 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

DASMINTO.S.Pi.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661207 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. PENJELASAN UMUM	
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2 2
A.2.1.Kebijakan Fiskal/keuangan.....	3
A.2.2.Perkembangan Ekonomi makro daerah	4
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan	5
A.3.1 Basis Akuntansi	6
A.3.2 Dasar Pengukuran	6
A.4. Kebijakan Akuntansi.....	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....	14
B.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	14
B.2.1 Pendapatan	14
B.2.2 Belanja.....	17
B.2.2.1 Belanja Pegawai	18
B.2.2.2 Belanja Barang.....	18
B.2.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	18
B.2.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.2.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	19
B.2.2.6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	19
B.3. Catatan Penting Lainnya.....	19
B.3.1 Pendapatan.....	19
B.3.2 Belanja.....	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	
C.1. Penjelasan Umum Neraca	20
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	20
C.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	20
C.2.2. Kas Di Bendahara Penerimaan.....	21
C.2.3. Kas Lainnya dan Setara Kas.....	21
C.2.4 Piutang Lainnya	21
C.2.5. Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Pendek	21
C.2.6. Beban Dibayar di Muka.....	22

C.2.7. Persediaan.....	22
C.2.8. Tanah.....	24
C.2.9. Peralatan dan Mesin.....	24
C.2.10. Gedung dan Bangunan.....	27
C.2.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	28
C.2.12. Aset Tetap Lainnya.....	28
C.2.13. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).....	29
C.2.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	30
C.2.15. Aset Lainnya.....	31
C.2.16. Utang Perhitungan Pihak Ketiga.....	31
C.2.17. Pendapatan Diterima di Muka.....	32
C. 2.18. Utang Beban	32
C. 2.19. Utang Jangka Pendek Lainnya	32
C.2.20. Ekuitas.....	33
C.3. Catatan Penting Lainnya	33
C.3.1. BMD Ekstrakomptabel.....	33
C.3.2. Informasi BMD Lainnya.....	35
D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL	
D.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	36
D.2 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional.....	41
D.2.1. Pendapatan -LO.....	41
D.2.2. Beban.....	42
D.2.3 Kegiatan Non Operasional	44
D.2.4 Pos Luar Biasa	44
D.5 Catatan Penting Lainnya.....	45
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
E.1 Ekuitas Umum LPE.....	46
E.2 Catatan Penting Lainnya.....	46
E.2.1 Ekuitas Awal.....	46
E.2.2 Surplus (Defisit) LO.....	46
E.2.3 Ekuitas Akhir.....	46
E.2.4 Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulatif Aset Tetap.....	46
E.2.5 Kewajiban Untuk dikonsolidasikan.....	47
E.2.6 Koreksi Ekuitas Lainnya.....	47

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Kriteria Kualitas Piutang	9
2. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek.....	22
3. Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	22
4. Rincian Persediaan	23
5. Rincian Beban Persediaan (LO) dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA).....	24
6. Posisi Tanah di Neraca Semester I Tahun anggaran 2019.....	24
7. Peralatan dan Mesin yang alih status ke Pengelola Barang	26
8. Posisi aset peralatan dan mesin di neraca tahun 2019.....	27
9. Posisi Gedung dan Bangunan di Neraca Tahun anggaran 2019.....	27
10. Posisi aset jalan, irigasi dan jaringan di neraca tahun 2019.....	28
11. Posisi aset tetap lainnya di neraca tahun 2019.....	29
12. Posisi aset KDP di neraca semester I tahun 2019.....	29
13. Posisi akumulasi penyusutan aset tetap di neraca tahun 2019.....	30
14. Posisi aset lainnya di neraca tahun 2019.....	31
15. Posisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Semester I TA 2019.....	31
16. Posisi aset ekstrakomptabel di Neraca 30 Juni 2019.....	33
17. BMD per akun Neraca	34
18. BMD di laporan barang dan laporan keuangan per 30 Juni Tahun 2019.....	35

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK

I.	Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan	15
II.	Komposisi target dan realisasi pendapatan	16
III.	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis.....	17
IV.	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 2017 dan 2018	18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Neraca Per 30 Juni 2019
2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
3. Laporan Operasional Per 30 Juni 2019
4. Laporan Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2019
5. BAR Rekon Aset 2019

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418
Telp./Fax. (0717) 431513

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Juli 2019
Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan

DASMINTO,S.Pi,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661207 199503 1 001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58); dan
14. Ketentuan-ketentuan hukum lain dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

A.2. Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Kebijakan
Fiskal/keuangan
dan Ekonomi
Makro*

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya untuk masyarakat pesisir dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Peraturan Gubernur No.58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Entitas berkedudukan di jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418.

Salah satu peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan pemerintah daerah dapat ditingkatkan yang pada akhirnya laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju laporan keuangan daerah yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan berkelanjutan yang berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintahan
- Membina secara efektif dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal kepada para pemangku keputusan

A.2.1.Kebijakan Fiskal/keuangan

Total anggaran belanja fiscal Dinas kelautan dan perikanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencapai Rp.41.976.092.200,- meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp.16.721.395.960,- dan belanja langsung sebesar Rp. 25.254.696.240,-. Dibandingkan tahun 2018, terjadi peningkatan rencana anggaran belanja fiscal Dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2018

mencapai Rp.149.672.100,- . terdiri dari realisasi pendapatan UPTD Balai pemuliaan Ikan Rp.57.761.000,-, UPTD laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan Rp.7.126.000,- , UPTD Pangkalan pendaratan Ikan Rp.84.217.600,-, sewa kios Rp.540.000,- dan sewa alat selam Rp.27.500,- realisasi pendapatan ini lebih kecil dari tahun 2017 yang mencapai Rp.163.818.500,-. Tetapi secara umum untuk pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian fiscal daerah paada tahun 2018 sebesar 33,26 % dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar Rp.850,59 miliar atau tercapai sebesar 107,72% dari target tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 96,30%. Kontribusi realisasi PAD tertinggi diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp.787,23 miliar dengan pangsa sebesar 92,55% dari total realisasi PAD tahun 2018. Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam kategori cukup, tercermin dari 33,26% anggaran pendapatan pada tahun 2019 bersumber dari PAD. Penerimaan pajak daerah ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.

A.2.2.Perkembangan Ekonomi makro daerah

Pada semester I 2019 pertumbuhan ekonomi di provinsi kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan akan menguat dibandingkan semester II 2018 meskipun masih terbatas. Secara sektoral penguatan pertumbuhan ekonomi ini akan didorong oleh membaiknya kinerja industry pengolahan sejalan dengan membaiknya harga dunia beberapa komoditas yaitu timah dan CPO diakhir tahun 2018. Tetapi terdapat beberapa resiko yang perlu mendapat perhatian pada semester I 2019 ini yaitu: (1) Kondisi cuaca yang kurang menentu sehingga memberikan andil untuk beberapa komoditas mengalami inflasi, (2) terbatasnya

investasi karena sikap investor yang masih wait and see terhadap hasil RZWP3K, (3) pertumbuhan ekspor yang terbatas karena volume perdagangan dunia yang diprediksi masih melambat ditahun 2019. Struktur perekonomian kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV 2018 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu : industry pengolahan (20,27%), pertanian, kehutanan dan Perikanan (17,13%), perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (15,80%) dan pertambangan (10,19%). Empat lapangan usaha tersebut mampu menyumbang 63,40% dari total PDRB. Sementara itu, kinerja komoditas perikanan di semester I 2019 ini masih sangat lambat, melambatnya kinerja sector perikanan dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan ikan selama semester I 2019 dikarenakan kondisi cuaca yang kurang mendukung nelayan untuk melaut sehingga menyebabkan pasokan ikan berkurang.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan semester I 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Daerah.

SIMDA terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah. SIMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMDA-BMD adalah Sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah serta

Laporan Manajerial lainnya.

A.3.1 Basis Akuntansi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan Basis AkruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3.2 Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semester I 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tabel 1).

Tabel 1. Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

II. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 juni 2019.

Realisasi Pendapatan selama semester I Tahun 2019 sebesar Rp.168.065.335,- yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari estimasi pendapatan sebesar Rp.3.250.000.000,-

Realisasi Belanja selama semester I Tahun 2019 sebesar Rp.9.662.233.248,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.9.650.829.549,- dan Belanja Modal sebesar Rp.11.403.699,-, dari alokasi anggaran yang terdiri dari alokasi untuk belanja Operasi sebesar Rp.32.050.543.400,- dan belanja Modal sebesar Rp.9.925.548.800,- dengan total anggaran sebesar Rp.41.976.092.200,-

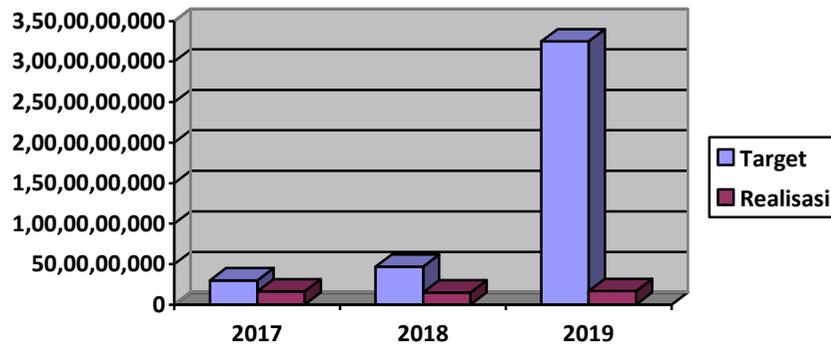
B.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

*Realisasi
Pendapatan
Rp.168.065.355*

B.2.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada semester I pertanggal 30 juni 2019 adalah sebesar Rp.168.065.355,- atau 5,17% dari target pendapatan sebesar Rp.3.250.000.000,- namun realisasi pendapatan ini kalau dilihat dari hasil perolehannya sudah lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp.149.672.100,- atau 31,98% dari target pendapatan sebesar Rp.468.000.000,- pada tahun 2018 dan di tahun 2017 yang mencapai Rp.163.818.500,- atau 54,61% dari target pendapatan sebesar Rp.300.000.000,- .

Grafik I. Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan



Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2019 yang sebesar Rp.168.065.355,- ini dihasilkan dari 3 (Tiga) sector penerimaan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni dari UPTD , Sewa Kios dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang terdiri dari:

1. UPTD Balai Pemuliaan Ikan

UPTD Balai Pemuliaan Ikan ini memungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. UPTD ini berada di 2 (dua) Lokasi berbeda yang dipimpin oleh 1(satu) kepala UPTD. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.43.142.000,- atau 17,25% dari target pendapatan sebesar Rp.250.000.000,-. Pendapatan ini masing-masing diperoleh dari UPTD BPI Air Payau Tanjung Krasak Rp.38.000.000,-dan UPTD BPI Air Laut Tanjung Rusa Rp.5.142.000,-. Hasil ini masih sedikit kecil kalau dilihat dari tahun 2018 yang memperoleh penerimaan sebesar Rp.57.761.000,- atau 57,76 % dari target pendapatan sebesar Rp.100.000.000,-.

2. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

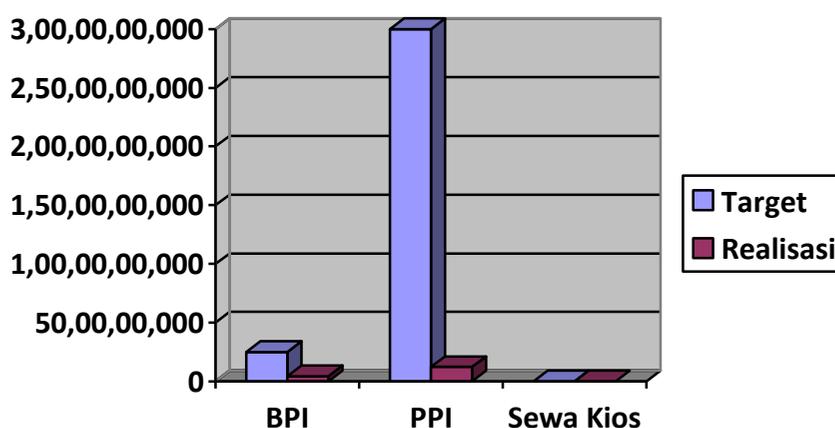
UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.124.562.660,- atau 4,15% dari target pendapatan sebesar Rp.3.000.000.000,-. Pendapatan ini diperoleh dari 6 (enam) Pangkalan Pendaratan Ikan

yaitu : PPI Kurau Rp.14.726.000,-, PPI Sungai Selan Rp.12.511.000,-, PPI Sadai Rp. 59.206.600,-, PPI Selat Nasik Rp. 5.040.000,-, PPI Manggar Rp.21.821.800,- dan PPI Gantung Rp. 11.257.260,-. Nilai ini sudah lebih besar dari hasil yang diperoleh dari penerimaan pada tahun 2018 yang sebesar Rp.84.217.600,- atau 22,88% dari target pendapatan sebesar Rp. 368.000.000,-

3. Sewa Kios DKP

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa kios untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.360.000,- dari target Rp.0,- dan ini hampir mencapai nilai yang diperoleh pada 31 Desember 2018 yang sebesar Rp.540.000,- dari target pendapatan sebesar Rp. 0,- (Pelaksanaan Pungutan retribusi pada tahun 2018 ini berdasarkan atas Surat Instruksi Sekretaris Daerah No.974/2658/BAKUDA tanggal 10 September 2018 perihal Pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha). Dan juga ada jasa giro bank senilai Rp.695,- yang tidak ditarik otomatis oleh bank untuk disetor langsung ke kasda .

Grafik II. Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan



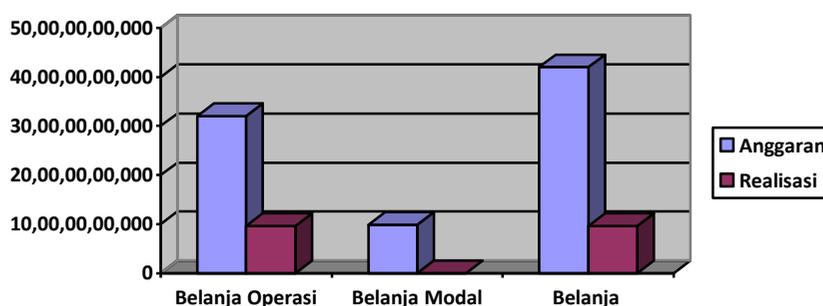
B.2.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I 2019 adalah sebesar Rp.9.662.233.248,- atau 23,01 % dari anggaran belanja sebesar Rp.41.976.092.200,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian dan Realisasi Belanja Semester I 2019

URAIAN	2019		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
Belanja Operasi	32.050.543.400	9.650.829.549	30,11
Belanja Modal	9.925.548.800	11.403.699	0,11
Total Belanja Daerah	41.976.092.200	9.662.233.248	23,01

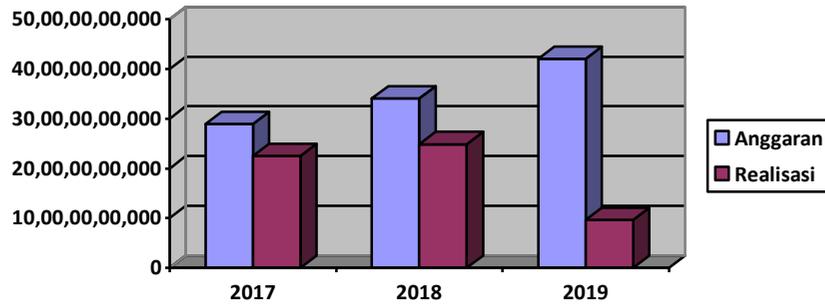
Grafik III. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis



Tabel 4. Realisasi Belanja Semester I 2019 Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 dan 2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentasi
2017	28.925.435.251	22.520.492.392	77,86%
2018	34.093.486.989	24.861.237.818	72,92%
2019	41.976.092.200	9.662.233.248	23,01%

**Grafik IV. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
2017, 2018 dan 2019**



*Belanja Pegawai
Rp.6.502.243.724* **B.2.2.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.6.502.243.724,- atau 38,55% dan Rp.11.191.895.037,- atau 77,66%

*Belanja Barang dan jasa Rp.
3.148.585.825* **B.2.2.2 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.3.148.585.825,- atau 20,73% dan Rp.12.738.406.059,- atau 75,62%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.0 **B.2.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- atau 0% dan Rp.515.598.500,- atau 94,87%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.11.403.699 **B.2.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.11.403.699,- atau 0,11% dan Rp.0,- atau 0%

*Belanja Modal
Jalan,Irigasi
dan Jaringan
Rp.0*

B.2.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 30 Juni 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- atau 0% dan Rp.339.112.222,- atau 78,86%

*Belanja Modal
Aset Tetap
Lainnya Rp.0*

B.2.2.6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- atau 0% dan Rp.76.226.000,- atau 17,34%

B.3. Catatan Penting Lainnya

B.3.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode semester I 2019 belum maksimal untuk mencapai target dikarenakan :

1. Belum terlaksananya perbaikan dan pengadaan Sarana dan Prasarana dari dana DAK.
2. Belum Idealnya SDM yang ada di UPTD BPI dan UPTD PPI baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3. Belum terakomodirnya beberapa potensi retribusi didalam Peraturan Daerah yang mengatur pungutan Retribusi di PPI
4. Belum diserahkan PPI Sungai Batu Rusa oleh Kotamadya Pangkalpinang ke Provinsi kepulauan Bangka Belitung

B.3.2. Belanja

Realisasi Belanja untuk periode semester I 2019 masih sangat kecil dikarenakan semua kegiatan yang masuk dalam kategori belanja modal masih dalam proses lelang dan proses pelaksanaan sehingga berpengaruh terhadap jumlah penyerapan anggaran di OPD Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan (asset, kewajiban dan ekuitas dana) pada tanggal tertentu. Asset diklasifikasikan menjadi asset lancar dan asset non lancar. Asset lancar terdiri dari kas atau asset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Asset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, asset tetap dan asset lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Nilai Aset Neraca selama semester I Tahun 2019 sebesar Rp.112.847.759.858,86,- yang berasal dari asset lancar Rp.898.395.239,39,- , asset tetap Rp.98.190.515.726,47,- , dan asset lainnya Rp.13.758.848.893,-

Untuk nilai kewajiban sebesar Rp.666.344.932,- sedangkan Ekuitas sebesar Rp.112.181.414.926,86,- sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp.112.847.759.858,86,-

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp.356.746.695,33,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.356.746.695,33,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca.

*Kas Di Bendahara
Penerimaan
Rp.2.781.695,-*

C.2.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp.2.781.695,- dan Rp.0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0,-*

C.2.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Sedangkan untuk kas lainnya 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

*Piutang Lainnya Rp
134.792.119,-*

C.2.4 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.134.792.119,- dan Rp.0,-. Piutang Lainnya merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo piutang lainya sebesar Rp.134.792.119,- yang ada dineraca dikarenakan adanya uang panjar yang belum diselesaikan pembayarannya dari beberapa kegiatan dan UPTD yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek Rp. 0,-*

C.2.5. Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Beban Bayar di Muka

Rp. 0,-

C.2.6. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2019	TH 2018
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.2.7. Persediaan

Persediaan

Rp. 404.074.730,06

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 404.074.730,06 (*Empat Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh koma Nol enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 Januari 2019, mutasi tambah dan mutasi kurang persediaan selama semester I tahun 2019.

Saldo awal per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 517.349.090,40,- (*Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu*). Mutasi tambah persediaan sebesar Rp. 625.644.266,- (*Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) Sedangkan mutasi kurang persediaan sebesar Rp. 738.918.626,33,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah Enam Ratus Dua Puluh Enam Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah*)

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp. 0,- (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp. 0,- (*Nol rupiah*). Adapun rincian barang persediaan yang masih tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2019	TH 2018
Bahan Kimia	52,04,000.00	1,08,21,500.00
Persediaan Alat Tulis Kantor	3,40,76,456.33	1,92,10,916.67
Barang Cetak	18,61,000.00	11,27,500.00
Bahan Bakar Minyak/Gas	8,60,000.00	39,52,000.00
Bahan Baku Bangunan	4,62,25,000.00	6,78,93,000.00
Obat-obatan	12,21,073.73	74,09,073.73
Bahan Makanan Pokok	6,49,72,000.00	14,21,05,000.00
Persediaan Isi Tabung Gas	1,65,000.00	1,65,000.00
Alat Listrik dan elektronik	25,94,500.00	35,16,000.00
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7,76,000.00	4,09,000.00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21,75,200.00	26,75,600.00
Bibit Ternak	24,39,44,500.00	25,80,64,500.00
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
Barang yg akan diberikan kepada pihak ketiga	-	-
Jumlah	40,40,74,730.06	51,73,49,090.40

Dari rincian persediaan diatas apabila disandingkan dengan Beban Persediaan (LO) yang senilai Rp.927.809.851,34,- dan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) yang senilai Rp.740.391.591,- akan terlihat perbedaan nilai sebesar Rp.74.143.900,- yang disebabkan oleh adanya SPJ yang belum di GU kan pada saat tutup buku per 30 Juni 2019. Adapun rincian beban persediaan (LO) dan Belanja Barang dan Jasa persediaan (LRA) adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Beban Persediaan (LO) dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA)

Beban	LO	LRA	Belum Di GU
Persediaan Alat Tulis Kantor	12,39,15,220.00	13,41,38,260.00	46,42,500.00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	1,25,61,000.00	93,17,000.00	23,22,500.00
persediaan Perangko,Materai, Pos lainnya	20,27,000.00	23,94,000.00	-
Persediaan alat Kebersihan n bhn pembersih	3,15,56,800.00	2,60,66,100.00	49,90,300.00
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	6,54,99,000.00	6,24,07,000.00	-
Persediaan Pengisian Isi Tabung gas	14,05,000.00	9,10,000.00	4,95,000.00
Pengisian Ulang Air Galon	24,72,000.00	24,16,000.00	56,000.00
Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Lab	5,00,000.00	5,00,000.00	-
Persediaan Barang cetakan	-	-	-
Persediaan Bahan Baku Bangunan	2,16,68,000.00	-	-
Persediaan Bibit Ternak	3,61,70,000.00	2,20,50,000.00	-
Persediaan Bahan Obat-obatan	1,01,88,000.00	40,00,000.00	-
Persediaan Bahan Kimia	56,17,500.00	-	-
Persediaan Makanan Pokok	7,71,33,000.00	-	-
Bahan Kimia	54,37,500.00	41,75,000.00	12,62,500.00
Bahan Logistik Rumah Tangga	58,50,000.00	40,00,000.00	-
Cinderamata	40,00,000.00	1,00,00,000.00	-
Dekorasi	1,00,00,000.00	4,50,00,000.00	-
Bahan Pakan Ternak	4,50,00,000.00	62,82,000.00	-
Bahan Makanan Tambahan	1,16,03,600.00	2,50,00,000.00	53,21,600.00
Peralatan Kerja	2,50,00,000.00	1,78,35,000.00	-
Perlengkapan Peserta	3,78,35,000.00	58,50,000.00	2,00,00,000.00
Cetak	1,02,89,000.00	85,92,500.00	24,30,000.00
Penggandaan	57,42,431.00	52,43,931.00	4,98,500.00
Penjilidan	4,96,000.00	4,96,000.00	-
Makanan dan Minuman Rapat	2,71,08,500.00	1,89,83,500.00	81,25,000.00
Makanan dan Minuman Tamu	82,10,300.00	82,10,300.00	-
Makanan dan Minuman Pelatihan	6,56,25,000.00	4,16,25,000.00	2,40,00,000.00
Pakaian Seragam Panitia dan Penjaga Stand	45,00,000.00	45,00,000.00	-
Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	27,04,00,000.00	27,04,00,000.00	-
	92,78,09,851.00	74,03,91,591.00	7,41,43,900.00

Tanah

Rp. 1.577.661.184,-

C.2.8. Tanah

Saldo tanah pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 1.577.661.184,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Empat rupiah*). Saldo awal tanah per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 1.577.661.184,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Empat rupiah*). Pada semester I tahun 2019 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap asset tanah.

Tabel 5. Posisi Tanah di Neraca Semester I Tahun anggaran 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	1,57,76,61,184.00	-	-	1,57,76,61,184.00
	Jumlah	1,57,76,61,184.00	-	-	1,57,76,61,184.00

C.2.9 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp. 39.715.664.449,80

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 39.715.664.449,80,- (*Tiga Puluh Sembilan*

Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Enam ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan koma delapan puluh rupiah). Saldo awal peralatan dan mesin per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 40.645.066.399,80,- (Empat Puluh milyar Enam ratus Empat puluh Lima juta Enam puluh Enam ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh rupiah). Mutasi tambah dan dan mutasi kurang atas aset peralatan dan mesin selama periode laporan masing-masing sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) dan Rp. 929.401.900,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus rupiah).

Untuk Mutasi kurang aset peralatan dan mesin, nilai mutasi kurang sebesar Rp. 929.401.900,- (*Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus rupiah*). Mutasi tersebut disebabkan oleh adanya alih status asset (alat-alat angkutan) dari pengguna barang ke pengelola barang sebesar Rp. 929.401.900,- (*Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus rupiah*).

Sedangkan asset yang beralih status asset (alat-alat angkutan) dari pengguna barang ke pengelola barang adalah sebagai berikut:

Tabel 6.Peralatan dan mesin yang alih status ke pengelola barang

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	Alat-alat angkutan				
	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Nissan Navara	1	38,88,51,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Pick Up	Toyota Hilux 2,5 G	1	38,05,75,900.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Jupiter MX 1	1	1,43,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Jupiter MX 1	1	1,43,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Jupiter MX 1	1	1,43,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	FD 110 Shogun	1	1,10,00,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	1	1,76,75,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	TOTAL			92,94,01,900.00	

Dengan adanya mutasi kurang pada aset peralatan dan mesin, maka nilai aset peralatan dan mesin pada neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Posisi aset peralatan dan mesin di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Alat-alat besar	3,39,12,40,863.32	-	0	3,39,12,40,863.32
2	Alat-alat Angkutan	17,29,42,21,603.83	-	92,94,01,900.00	16,36,48,19,703.83
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4,57,72,33,784.71	-	-	4,57,72,33,784.71
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4,03,38,59,138.33	-	-	4,03,38,59,138.33
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	6,84,10,57,440.61	-	-	6,84,10,57,440.61
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	81,26,23,250.00	-	-	81,26,23,250.00
7	Alat-alat Kedokteran	2,18,92,000.00	-	-	2,18,92,000.00
8	Alat-alat Laboratorium	3,44,12,36,819.00	-	-	3,44,12,36,819.00
9	Alat-alat Keamanan	23,17,01,500.00	-	-	23,17,01,500.00
					-
	Jumlah	40,64,50,66,399.80	-	92,94,01,900.00	39,71,56,64,499.80

C.2.10 Gedung dan Bangunan

Gedung dan

Bangunan

Rp.45.330.835.310,52

Saldo gedung dan bangunan pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 45.330.835.310,52,- (*Empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sepuluh koma lima puluh dua rupiah*). Saldo awal gedung dan bangunan per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 45.330.835.310,52,- (*Empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sepuluh koma lima puluh dua rupiah*). Mutasi tambah dan dan mutasi kurang atas aset gedung dan bangunan selama Semester I Tahun Anggaran 2019 masing-masing Rp. 0,- (*Nol rupiah*).

Dengan tidak adanya mutasi tambah dan mutasi kurang aset gedung dan bangunan, maka posisi aset di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Posisi Gedung dan Bangunan di Neraca Tahun anggaran 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2017	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gedung dan Bangunan	45,33,08,35,310.52	-	-	45,33,08,35,310.52
	Jumlah	45,33,08,35,310.52	-	-	45,33,08,35,310.52

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.62.735.996.680,15

C.2.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 62.735.996.680,15,- (*Enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh koma lima belas rupiah*). Saldo awal jalan, irigasi dan jaringan per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 62.735.996.680,15,- (*Enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh koma lima belas rupiah*). Mutasi tambah dan dan mutasi kurang atas aset jalan, irigasi dan jaringan selama periode laporan masing-masing sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*). Dengan tidak adanya mutasi tambah dan mutasi kurang ini maka posisi jalan, irigasi dan jaringan di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Posisi aset jalan, irigasi dan jaringan di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Jalan dan Jembatan	12,99,94,68,574.00	-	-	12,99,94,68,574.00
2	Bangunan Air/Irigasi	46,07,76,31,742.97	-	-	46,07,76,31,742.97
3	Instalasi	1,79,48,61,713.18	-	-	1,79,48,61,713.18
4	Jaringan	1,86,40,34,650.00	-	-	1,86,40,34,650.00
	Jumlah	62,73,59,96,680.15	-	-	62,73,59,96,680.15

C.2.12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp.1.108.554.000,-

Saldo aset tetap lainnya pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 1.108.554.000,- (*Satu milyar seratus delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*). Saldo awal aset tetap lainnya per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 1.108.554.000,- (*Satu milyar seratus delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2019 masing-masing sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*).

Dengan tidak adanya mutasi tambah dan mutasi kurang ini ini maka aset tetap lainnya di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Posisi aset tetap lainnya di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Aset tetap lainnya	1,10,85,54,000.00	-	-	1,10,85,54,000.00
	Jumlah	1,10,85,54,000.00	-	-	1,10,85,54,000.00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp.9.449.740.999,-

C.2.13. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 9.449.740.999,- (*Sembilan milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan rupiah*). Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 9.379.707.300,- (*Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*). Mutasi tambah dan dan mutasi kurang atas konstruksi dalam pengejaan (KDP) selama periode laporan masing-masing sebesar Rp. 70.033.699,- (*Tujuh Puluh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan rupiah*) dan Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Mutasi tambah didalam Konstruksi Dalam Pengerjaan ini Berasal dari Belanja Modal 2019 yakni Biaya SPPD(Fullcoasting) Rp. 11.403.699,00 dan Biaya Konsultan Rp. 58.630.000,00

Dengan adanya mutasi ini, posisi aset konstruksi dalam pengerjaan di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Posisi aset KDP di neraca semester I tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)	9.379.707.300,00	70.033.699,00	-	9.449.740.999,00
	Jumlah	9.379.707.300,00	70.033.699,00	-	9.449.740.999,00

C.2.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan kebijakan akuntansi atas penyusutan aset tetap sesuai masa manfaat masing-masing aset dengan menggunakan metode garis lurus.

Nilai penyusutan aset tetap pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (59.261.210.176,-) (*Lima puluh Sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*). Terdapat penambahan nilai penyusutan selama smester I Tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.021.071.527,- (*Tiga Milyar Dua Puluh satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima ratus Dua Puluh Tujuh rupiah*) dan pengurangan nilai penyusutan sebesar Rp. 554.439.373,- (*Lima Ratus Lima Puluh empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh tiga rupiah*) sehingga nilai penyusutan per 30 Juni 2019 sebesar Rp. (61.727.936.947,-) (*Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh tujuh rupiah*).

Akumulasi penyusutan aset tetap dalam neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Posisi akumulasi penyusutan aset tetap di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Penyusutan tahun 2019		Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Akumulasi penyusutan aset tetap	59.261.304.793,00	3.021.071.527,00	554.439.373,00	61.727.936.947,00
	Jumlah	59.261.304.793,00	3.021.071.527,00	554.439.373,00	61.727.936.947,00

Aset Lainnya
Rp.13.758.848.893,-

C.2.15. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 13.758.848.893,- (*Tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah*). Saldo awal aset lainnya per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 13.758.848.893,- (*Tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah*). Mutasi tambah dan dan mutasi kurang atas lainnya selama periode laporan masing-masing sebesar Rp. 0,- (*Nol rupiah*). Dengan tidak adanya mutasi aset ini, maka posisi aset lainnya di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Posisi aset lainnya di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Aset Lainnya	13,75,88,48,893.00	-	-	13,75,88,48,893.00
	Jumlah	13,75,88,48,893.00	-	-	13,75,88,48,893.00

Utang Perhitungan
Pihak Ketiga
Rp. 5.197.932,-

C.2.16. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.5.197.932,- (*Lima Juta seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) dan Rp.0,- (*Nol rupiah*). Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tersebut terdiri dari :

Tabel 14. Posisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Semester I TA 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)
1	1	2	5
1	Utang PPh Psl 21	-	13,05,000.00
2	Utang PPh Psl 22	-	4,04,114.00
3	Utang PPh Psl 23	-	9,92,818.00
4	PPN	-	24,96,000.00
	Jumlah PFK	-	51,97,932.00

*Pendapatan Diterima
di Muka Rp. 0,-*

C.2.17. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2019 dan 2018 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Utang Beban
Rp.602.517.000,-*

C. 2.18. Utang Beban

Nilai Utang Beban yang masih harus dibayar yang ditemukan pada neraca per 30 Juni 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 602.517.000,- (*Enam Ratus Dua Juta Lima ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*) dan Rp. 403.299.000,- (*Empat Ratus Tiga Ribu Dua ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah*) Utang Beban tersebut adalah Utang Beban Gaji Pegawai Sebesar Rp.403.299.000,- (*Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dan Utang Beban barang dan jasa atas pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp. 199.218.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta dua ratus delapan belas Ribu Rupiah*)

*Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp.58.630.000,-*

C. 2.19. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek adalah utang atau kewajiban yang jangka waktu pelunasannya tidak lebih dari satu tahun.

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya yang masih harus dibayar yang terlihat dalam neraca per 30 juni 2019 dan per 31 desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.630.000,- (*Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) dan Rp. 0. (*Nol Rupiah*). Utang Jangka Pendek lainnya tersebut adalah utang pengadaan aset tetap berupa biaya jasa konsultan perencanaan sapras Pangkalan Pendaratan Ikan senilai 58.630.000,- (*Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*)

Ekuitas

Rp.112.181.414.926,86

C.2.20. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.112.181.414.926,86,- (*Seratus Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan ratus Dua Puluh Enam Koma Delapan Puluh Enam Rupiah*) dan Rp.115.389.415.064,87,- (*Seratus Lima Belas Milyar Tiga ratus delapan Puluh Sembilan Juta empat ratus Lima Belas Ribu Enam Puluh empat Koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

C3. CATATAN PENTING LAINNYA

C.3.1. BMD Ekstrakomptabel

Barang Milik Daerah Ekstrakomptable merupakan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi. BMD ini diakui sebagai aset tetapi nilainya tidak disajikan dalam neraca. Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016, nilai aset tetap yang masuk pada asset ekstrakomptabel mengalami perubahan. Nilai BMD ekstrakomptable pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per **1 Januari 2019** sebesar **Rp.1.088.050.368,29** (*Satu milyar delapan puluh delapan juta lima puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah*). **Tidak ada Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang** pada aset ekstrakomptabel selama per **30 Juni tahun anggaran 2019** sebesar **Rp. 0,00** (*Nol rupiah*)

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset ekstrakomptabel di Neraca 30 Juni 2019 sebagai berikut:

Tabel 15. Posisi aset ekstrakomptabel di Neraca 30 Juni 2019

No	Uraian	Saldo per 31	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		Desember 2018			
1	2	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		3	4	5	6
1	BMD Ekstrakomptabel	1.088.050.368,29	-	-	1.088.050.368,29
	Jumlah	1.088.050.368,29	-	-	1.088.050.368,29

1. Barang Milik Daerah pada Laporan Barang Dinas dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per 31 Desember 2018.

a. BMD per akun neraca

Nilai BMD pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) per **30 Juni 2019** adalah sebesar **Rp. 113.382.859.717,82** (*Seratus tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas koma delapan puluh dua rupiah*), Nilai BMD dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMD dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. BMD per akun Neraca

Tanah	1.577.661.184,00	-	1.577.661.184,00
Peralatan dan Mesin	39.715.664.499,80	-	39.715.664.499,80
Gedung dan Bangunan	45.330.835.310,52	-	45.330.835.310,52
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.735.996.680,15	-	62.735.996.680,15
Aset Tetap Lainnya	1.108.554.000,00	-	1.108.554.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.449.740.999,00	-	9.449.740.999,00
ASET LAINNYA	13.758.848.893,00	-	13.758.848.893,00
Aset Tidak Berwujud	4.837.489.850,00	-	4.837.489.850,00
Aset Lain-lain *)	12.263.607.100,00	-	12.263.607.100,00
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	(3.342.248.057,00)	-	(3.342.248.057,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(61.727.936.947,00)	-	(61.727.936.947,00)
Akumulasi Penyusutan aset tetap	(61.727.936.947,00)	-	(61.727.936.947,00)
TOTAL (I+II+III+IV)	112.353.439.349,53	1.088.050.368,29	113.441.489.717,82

b. Perbandingan Nilai BMD pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan.

Perbandingan antara nilai BMD yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 30 Juni 2019 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 17. BMD di laporan barang dan laporan keuangan per 30 Juni Tahun 2019

NO	URAIAN NERACA	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Persediaan	404.074.730,06	404.074.730,06	-
2	Tanah	1.577.661.184,00	1.577.661.184,00	-
3	Peralatan dan Mesin	39.715.664.499,80	39.715.664.499,80	-
4	Gedung dan Bangunan	45.330.835.310,52	45.330.835.310,52	-
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.735.996.680,15	62.735.996.680,15	-
6	Aset Tetap Lainnya	1.108.554.000,00	1.108.554.000,00	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.449.740.999,00	9.449.740.999,00	-
8	Aset Tidak Berwujud	4.837.489.850,00	4.837.489.850,00	-
9	Aset Lain-lain *)	12.263.607.100,00	12.263.607.100,00	-
10	Akumulasi penyusutan + amortisasi aset tak berwujud	(65.070.185.004,00)	(65.070.185.004,00)	-
TOTAL		112.353.439.349,53	112.353.439.349,53	-

**) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMD yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah*

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMD tersebut diatas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMD antara laporan barang dan laporan keuangan.

C.3.2. INFORMASI BMD LAINNYA

1. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMD.

Pelaksanaan penatausahaan BMD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak permasalahan antara lain:

- a. Aset dalam kelompok aset tanah masih ada yang luasnya 0 m² dan hal ini merupakan perhatian dalam pemeriksaan BPK. Beberapa asset yang luasan 0 m² ini telah ditindaklanjuti dan masih tersisa aset dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- Untuk aset senilai 1.000.000.000,- Berdasarkan dokumen sumber yang telah ditemukan diketahui bahwa asset tersebut merupakan reklamasi lahan PPI Pangkalpinang yang asset induknya milik pemerintah Kota Pangkalpinang. Saat ini sedang dilakukan proses hibah atas PPI Pangkalpinang ke provinsi. Jika PPI kota Pangkalpinang diserahkan ke provinsi, maka nilai Rp. 1.000.000.000,- dapat dikapitalisasi ke asset induknya.
- b. Aset di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak yang belum dihapuskan sejak pengadaan tahun 2001;

- c. Aset-aset yang merupakan bantuan sosial untuk masih tercatat sebagai aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. Beberapa aset dicatat dalam satu paket tanpa diketahui rincian asetnya;
 - e. Dokumen pendukung atas aset (dokumen sumber) yang ada banyak yang belum ditemukan;
 - f. Kartu inventaris ruangan tidak pernah selesai dibuat karena antara barang di SIMDA BMD berbeda dengan apa yang di lapangan dan barang sering dipindah-pindahkan dari ruangan tanpa memberi tahu kepada pengurus barang.
 - g. Dan lain-lain
2. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah.
- Langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam menyelesaikan masalah antara lain:
- a. Tetap melakukan penelusuran terhadap dokumen sumber baik hardcopy maupun softcopy
 - b. Menertibkan pencatatan administrasi asset supaya lebih baik lagi

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.^[1]

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas:

- Pendapatan-LO
- Beban
- Transfer
- Pos Luar Biasa.

Tujuan

Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Periode Pelaporan

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Informasi yang Disajikan Dalam Laporan Operasional atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;
2. terjadinya konsumsi aset;
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban

bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Metode garis lurus (straight line method);
2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method);
3. Metode unit produksi (unit of production method).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

D.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2.1. Pendapatan -LO

*Realisasi Pendapatan –
LO Rp.168.065.355,-*

Realisasi pendapatan-LO Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.3.091.822.367,- (*Tiga Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah –LO sebesar Rp.149.672.100,-(*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam ratus Tujuh Puluh Dua Ribu seratus Rupiah*) dan Pendapatan Hibah-LO Sebesar Rp.2.942.150.267,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua*

Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sedangkan untuk periode per 30 Juni 2019 Realisasi pendapatan –LO adalah sebesar Rp.168.065.355,- (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga ratus Lima puluh Lima Rupiah*). Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp.168.064.660,- (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) dan dari lain-lain PAD yang sah-LO Rp.695,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*)

D.2.2 BEBAN

Beban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.30.582.868.300,33,- (*Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Koma Tiga Puluh Tiga*) yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp.13.604.494.037,- (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Empat Juta Empat ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) , Beban Barang dan Jasa Rp.8.938.019.804,33,- (*Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan belas Ribu Delapan ratus Empat Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah*) , Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 8.040.354.459,- (*Delapan Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) . Sehingga membuat surplus / defisit dari operasi sebesar Rp.(27.491.045.933,33) (*Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah*) sedangkan untuk periode per 30 Juni 2019 Realisasi Beban adalah sebesar Rp.13.775.481.507,34,- (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus tujuh Puluh lima Juta empat Ratus delapan*

puuluh satu Ribu Lima Ratus Tujuh Koma Tiga Puluh Empat Rupiah). yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp.7.493.932.724,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh ratus Dua Puluh empat Rupiah) , Beban Barang dan Jasa Rp.3.260.477.256,34,- (Tiga Miliar Dua Ratus enam Puluh Juta empat Ratus tujuh Puluh tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Koma Tiga Puluh Empat rupiah) , Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 3.021.071.527,- (Tiga Miliar Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) Sehingga membuat surplus / defisit dari operasi sebesar Rp.(13.607.416.152,34) (Tiga Belas Miliar enam Ratus Tujuh Juta empat Ratus enam belas Ribu Seratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Rupiah)

D.2.3 Kegiatan Non Operasional

Semua Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2018 Rp.0,-. Sehingga Surplus /Defisit dari kegiatan Non Operasi sebesar Rp.0,- dan membuat surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.(27.491.045.933,33) (*Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah*) dan demikian pula untuk Semua Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 30 Juni 2019 Rp.0,-. Sehingga Surplus /Defisit dari kegiatan Non Operasi sebesar Rp.0,- dan membuat surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.(13.607.416.152,34) (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*)

D.2.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas dan untuk tahun 2018 ini adalah Rp.0,-. Sehingga Surplus /Defisit -LO Rp.(27.491.045.933,33) (*Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah*) sedangkan untuk Semua Pos luar biasa per 30 Juni 2019 Rp.0,-. Sehingga Surplus /Defisit dari kegiatan Non Operasi sebesar Rp.0,- dan membuat surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.(13.607.416.152,34) (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*)

D.5. CATATAN PENTING LAINNYA

Pada periode per 30 Juni 2019 Realisasi pendapatan –LO adalah sebesar Rp.168.065.355,- (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Puluh Lima Ribu Tiga ratus Lima puluh Lima Rupiah*). Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp.168.064.660,- (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) dan dari lain-lain PAD yang sah-LO Rp.695,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*)

REKAPITULASI PENDAPATAN PER 30 JUNI 2019

No.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI(Rp.)
1	PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)	3.000.000.000	124.562.660
	1.KURAU		14.726.000
	2.SUNGAI SELAN		12.511.000
	3.SADAI		59.206.600
	4.SELAT NASIK		5.040.000
	5.MANGGAR		21.821.800
	6.GANTUNG		11.257.260
2	BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI)	250.000.000	43.142.000
	1.BPI AIR PAYAU TJ.KRASAK		38.000.000
	2.BPI AIR LAUT TJ.RUSA		5.142.000
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	360.695
	1.SEWA KIOS FOTOCOPY		360.000
	2.JASA GIRO BANK		695

E. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LPE

Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh instansi yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

Hal-hal yang terdapat dalam laporan perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

- Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
- Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam PSAK
- pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan perubahan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait,
- saldo akumulasi laba atau rugi pada awal ekuitas periode serta perubahannya

E.2. CATATAN PENTING LAINNYA

<i>Ekuitas Awal</i> Rp.115.389.415.064,87	E.2.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas Awal per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.115.389.415.064,87,-
Surplus(defisit) LO (Rp. 13.607.416.152,34)	E.2.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Surplus (defisit) LO per 30 Juni 2019 adalah Rp.(13.607.416.152,34) Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>Ekuitas Akhir</i> Rp.112.181.414.926,86	E.2.3 Ekuitas Akhir Nilai ekuitas akhir per 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.112.181.414.926,86,-
<i>Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulatif Penyusutan Aset Tetap</i> Rp.554.439.373,-	E.2.4 Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulatif Penyusutan Aset Tetap Koreksi atas nilai perolehan aset tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan

keuangan dan di per 30 Juni 2019 ini ada dampak dari akumulatif perubahan nilai akumulatif penyusutan aset tetap sebesar Rp.554.439.373,-

*Kewajiban Untuk
dikonsolidasikan
Rp.10.774.378.541,33,-*

E.2.5 Kewajiban Untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan di per 30 Juni 2019 ini sebesar Rp.10.774.378.541,33,-

*Koreksi Ekuitas lainnya
Rp.(929.401.900),-*

E.2.6 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya di per 30 Juni 2019 ini sebesar Rp.(929.401.900,-)

Pangkalpinang, Juli 2019
**Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan**

DASMINTO,S.PI,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661207 199503 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

LAPORAN KEUANGAN



**SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN
2019**

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pulau Bangka Kel. Air Itam

Kec. Bukit Intan

Pangkalpinang 33418

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi wajib menyusun Laporan Realisasi Tahunan APBD yang dikelolanya dan Laporan Keuangan Tahunan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun Laporan Keuangan tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual dan menggunakan aplikasi SIMDA sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

DASMINTO.S.Pi.M.Si
NIP. 19661207 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
LAMPIRAN-LAMPIRAN	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. PENJELASAN UMUM	
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2
A.2.1. Kebijakan Fiskal/ Keuangan	3
A.2.2. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	4
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	5
A.3.1. Basis Akuntansi	6
A.3.2. Dasar Pengukuran	6
A.4. Kebijakan Akuntansi	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	14
B.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	16
B.2.1. Pendapatan....	16
B.2.2. Belanja	18
B.2.3. Belanja Pegawai	20
B.2.4. Belanja Barang	20
B.2.5. Belanja Modal Peralatan Mesin	20
B.2.6. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	20
B.2.7. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20
B.3. Catatan Penting Lainnya	21
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	
C.1. Penjelasan Umum Neraca	23
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	23
C.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	23
C.2.2. Kas Dibendahara Penerimaan	24
C.2.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	24
C.2.4. Piutang Pendapatan	24
C.2.5. Penyisihan Piutang-Piutang Jangka Pendek	25
C.2.6. Beban diBayar di Muka	25
C.2.7. Persediaan	26
C.2.8. Tanah.....	27
C.2.9. Peralatan dan Mesin	27

C.2.10. Gedung dan Bangunan	29
C.2.11. Jalan, Irigasi dan Jaringan ..	30
C.2.12. Aset Tetap Lainnya	31
C.2.13. Kontruksi Dalam Pengerjaan	32
C.2.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	32
C.2.15. Aset Lainnya	33
C.2.16. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	34
C.2.17. Pendapatan Diterima di Muka	34
C.2.18. Utang Beban	34
C.2.19. Ekuitas	35
C.3. Catatan Penting Lainnya	35
C.3.1. BMD Ekstrakomptabel	35
C.3.2. Informasi BMD Lainnya	38
D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL	
D.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional	39
D.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
D.2.1. Pendapatan LO.....	43
D.2.2. Beban	43
D.2.3. Kegiatan Non Operasional	45
D.2.4. Pos Luar Biasa	46
D.3. Catatan Penting Lainnya	46
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	48
E.1 Penjelasan Umum LPE	48
E.2 Catatan Penting Lainnya	48
E.2.1. Ekuitas Awal	48
E.2.2. Surplus (Defisit) LO	48
E.2.3. Ekuitas Akhir	48
E.2.4. Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulatif Penyusutan Aset Tetap	48
E.2.5. Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	49
E.2.6. Kewajiban Untuk diKonsolidasikan	49
E.2.7. Koreksi Ekuitas Lainnya	49
F. INFORMASI LAIN – LAIN	50
KESIMPULAN	50

DAFTAR TABEL

TABEL

1. Kriteria Kualitas Piutang	13
2. Rincian dan Realisasi Belanja Tahun 2019	19
3. Realisasi Belanja Tahun 2019 Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 dan 2017	19
4. Rekap Jumlah Piutang Retribusi	24
5. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek	25
6. Rincian Belanja Dibayar di Muka	25
7. Rincian Persediaan	26
8. Posisi Tanah di Neraca Tahun Anggaran 2019	27
9. Peralatan dan Mesin yang Alih Status ke Pengelola Barang	28
10. Posisi Aset Peralatan dan Mesin di Neraca Tahun 2019	29
11. Posisi Gedung dan Bangunan di Neraca Tahun Anggaran 2019	30
12. Posisi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca Tahun 2019	31
13. Posisi Aset Tetap Lainnya di Neraca Tahun 2019	31
14. Posisi Aset KDP di Neraca Semester I Tahun 2019	32
15. Posisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di Neraca Tahun 2019	33
16. Posisi Aset Lainnya di Neraca Tahun 2019	34
17. Posisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Semester 1 Tahun 2019	34
18. Posisi Aset Ekstrakomtebel di Neraca 31 Desember 2019	36
19. Per Akun Neraca	36
20. BMD di Laporan barang dan Laporan Keuangan per 30 Desember Tahun 2019.....	37
21. Aset Hibah Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.....	37

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK

I.	Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan	16
II.	Komposisi target dan realisasi pendapatan	18
III.	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis	19
IV.	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 2017 dan 2018	19

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Neraca Per 31 Desember 2xx1
2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2xx1
3. Laporan Operasional Per 31 Desember 2xx1
4. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2xx1
5. BAR Rekon Aset 2019

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418
Telp./Fax. (0717) 431513

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan

DASMINTO,S.Pi,M.Si
NIP. 19661207 199503 1 001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58); dan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Ketentuan-ketentuan hukum lain dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

A.2. Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Kebijakan
Fiskal/keuangan
dan Ekonomi
Makro*

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya untuk masyarakat pesisir dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Peraturan Gubernur No.58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Entitas

berkedudukan di jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418.

Salah satu peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan yang pada akhirnya laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju laporan keuangan daerah yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan berkelanjutan yang berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintahan
- Membina secara efektif dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal kepada para pemangku keputusan

A.2.1.Kebijakan Fiskal/keuangan

Total anggaran belanja fiskal Dinas kelautan dan perikanan Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencapai Rp.41.652.146.291,- meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.729.570.051,- dan belanja langsung sebesar Rp. 24.922.576.240,- . Dibandingkan tahun 2018, terjadi peningkatan rencana anggaran belanja fiskal Dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencapai Rp.435.976.155,- . terdiri dari realisasi pendapatan UPTD Balai pemuliaan Ikan Rp.163.682.000,-, UPTD laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan Rp.7.587.000,-, Pangkalan pendaratan Ikan Rp.262.801.460,-, sewa kios Rp.1.080.000,- dan sewa alat selam Rp.825.000,- dan Jasa Giro Bendahara penerimaan realisasi pendapatan ini jauh lebih besar dari tahun 2018 yang mencapai Rp.149.672.100,-. Tetapi secara umum untuk pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian fiscal daerah paada tahun 2018 sebesar 33,26 % dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar Rp.850,59 miliar atau tercapai sebesar 107,72% dari target tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 96,30%. Kontribusi realisasi PAD tertinggi diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp.787,23 miliar dengan pangsa sebesar 92,55% dari total realisasi PAD tahun 2018. Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam kategori cukup, tercermin dari 33,26% anggaran pendapatan pada tahun 2019 bersumber dari PAD. Penerimaan pajak daerah ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.

A.2.2.Perkembangan Ekonomi makro daerah

Pada semester I 2019 pertumbuhan ekonomi di provinsi kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan akan menguat dibandingkan semester II 2018 meskipun masih terbatas. Secara sektoral penguatan pertumbuhan ekonomi ini akan didorong oleh membaiknya kinerja industry pengolahan sejalan dengan membaiknya harga dunia beberapa komoditas yaitu timah dan CPO diakhir tahun 2018. Tetapi terdapat beberapa resiko yang perlu mendapat perhatian pada semester I 2019 ini yaitu: (1)

Kondisi cuaca yang kurang menentu sehingga memberikan andil untuk beberapa komoditas mengalami inflasi, (2) terbatasnya investasi karena sikap investor yang masih wait and see terhadap hasil RZWP3K, (3) pertumbuhan ekspor yang terbatas karena volume perdagangan dunia yang diprediksi masih melambat ditahun 2019. Struktur perekonomian kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV 2018 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu : industry pengolahan (20,27%), pertanian, kehutanan dan Perikanan (17,13%), perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (15,80%) dan pertambangan (10,19%). Empat lapangan usaha tersebut mampu menyumbang 63,40% dari total PDRB. Sementara itu, kinerja komoditas perikanan di semester I 2019 ini masih sangat lambat, melambatnya kinerja sector perikanan dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan ikan selama semester I 2019 dikarenakan kondisi cuaca yang kurang mendukung nelayan untuk melaut sehingga menyebabkan pasokan ikan berkurang.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Daerah.

SIMDA terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah. SIMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMDA-BMD adalah Sistem yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah serta Laporan Manajerial lainnya.

A.3.1 Basis Akuntansi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan Basis AkruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.3.2 Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUD).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tabel 1).

Tabel 1. Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan selama Tahun 2019 sebesar Rp.435.976.155,- yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari estimasi pendapatan sebesar Rp.517.080.000,-

Realisasi Belanja selama Tahun 2019 sebesar Rp.28.391.089.333,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.23.649.973.222,- dan Belanja Modal sebesar Rp.4.741.116.111,-, dari alokasi anggaran yang terdiri dari alokasi untuk belanja Operasi sebesar Rp.31.379.642.491,- dan belanja Modal sebesar Rp.10.272.503.800,- dengan total anggaran sebesar Rp.41.652.146.291,-

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 mendapatkan alokasi Dana awal sebesar Rp.41.976.092.200,-(empat puluh satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.16.721.395.960,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)dan Belanja Langsung sebesar Rp. 25.254.696.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah),terdiri dari 1 Program urusan Rutin/Wajib dan 8 Program pendukung langsung pencapaian sasaran, dimana dari 9 program tersebut terdapat 37 kegiatan.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 323.945.909,00 (tiga ratus duapuluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus sembilan rupiah). Dengan demikian, total alokasi dana belanja pada pagu perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 41.652.146.291,00 (empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah). Alokasi Dana Belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.729.570.051,00 (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu lima puluh satu rupiah); dan Belanja Langsung sebesar Rp. 24.922.576.240,00 (dua puluh empat milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah). Pada Belanja Langsung ini terdapat dana DAK sebesar Rp. 4.430.750.000,00 yaitu berupa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Perairan, Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan, Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas pokok dan Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Balai Pemuliaan Ikan (BPI) Tanjung Rusa. Dengan demikian, total belanja langsung setelah dikurangi dengan dana DAK menjadi sebesar Rp. 20.491.826.240,00,- (dua puluh milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

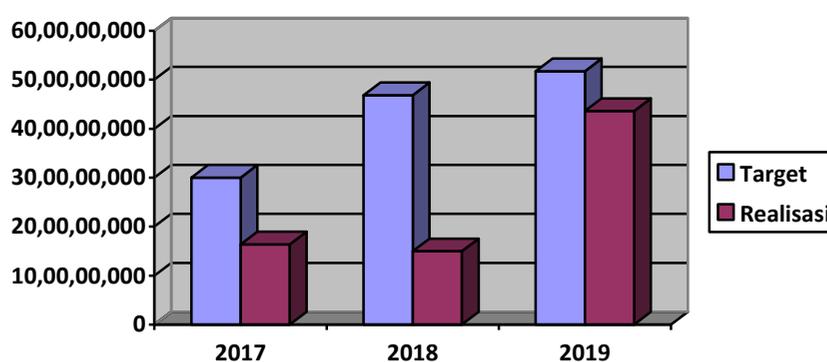
Realisasi
Pendapatan
Rp.435.976.155

B.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

B.2.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan pertanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.435.976.155,- atau 84,31% dari target pendapatan sebesar Rp.517.080.000,- namun realisasi pendapatan ini kalau dilihat dari hasil perolehannya sudah lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp.149.672.100,- atau 31,98% dari target pendapatan sebesar Rp.468.000.000,- pada tahun 2018 dan di tahun 2017 yang mencapai Rp.163.818.500,- atau 54,61% dari target pendapatan sebesar Rp.300.000.000,- .

Grafik I. Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan



Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp.435.976.155,- ini dihasilkan dari 3 (Tiga) sector penerimaan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni dari UPTD , Sewa Kios dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang terdiri dari:

1. UPTD Balai Pemuliaan Ikan

UPTD Balai Pemuliaan Ikan ini memungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. UPTD ini berada di 2 (dua) Lokasi berbeda yang dipimpin oleh 1(satu) kepala UPTD. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.163.682.000,- atau 65,47% dari target pendapatan sebesar Rp.250.000.000,-. Pendapatan ini masing-masing diperoleh dari UPTD BPI Air Payau Tanjung Krasak

Rp.140.340.000,-dan UPTD BPI Air Laut Tanjung Rusa Rp.23.342.000,-. Hasil ini masih sedikit kecil kalau dilihat dari tahun 2018 yang memperoleh penerimaan sebesar Rp.57.761.000,- atau 57,76 % dari target pendapatan sebesar Rp.100.000.000,-.

2. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan

UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.262.801.460,- atau 98.79% dari target pendapatan sebesar Rp.266.000.000,-. Pendapatan ini diperoleh dari 6 (enam) Pangkalan Pendaratan Ikan yaitu : PPI Kurau Rp.48.181.000,-, PPI Sungai Selan Rp.21.014.000,-, PPI Sadai Rp. 71.705.600,-, PPI Selat Nasik Rp. 11.930.000,-, PPI Manggar Rp.60.105.600,- dan PPI Gantung Rp. 49.865.260,-. Nilai ini sudah lebih besar dari hasil yang diperoleh dari penerimaan pada tahun 2018 yang sebesar Rp.84.217.600,- atau 22,88% dari target pendapatan sebesar Rp. 368.000.000,-

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kios DKP, Sewa Alat Selam dan Pengujian LPPMHP)

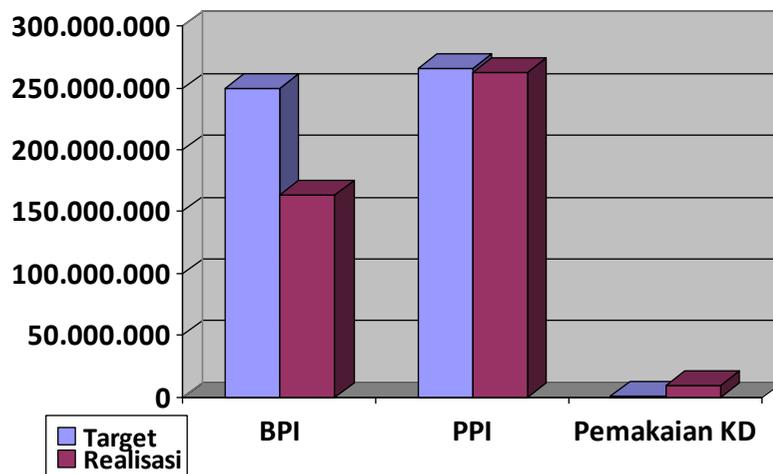
Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa kios untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.080.000,- dari target Rp.0,- dan nilai yang diperoleh pada 31 Desember 2018 yang sebesar Rp.540.000,- dari target pendapatan sebesar Rp. 0,-

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa Alat Selam untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.825.000,- dari target Rp.0,-

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Jasa Pengujian LPPMHP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.7.587.000,- dari target Rp.0,-

(Pelaksanaan Pungutan retribusi pada tahun 2018 ini berdasarkan atas Surat Instruksi Sekretaris Daerah No.974/2658/BAKUDA tanggal 10 September 2018 perihal Pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha). Dan juga ada jasa giro bank senilai Rp.695,- yang tidak ditarik otomatis oleh bank untuk disetor langsung ke kasda .

Grafik II. Komposisi Target dan Realisasi Pendapatan



B.2.2 Belanja

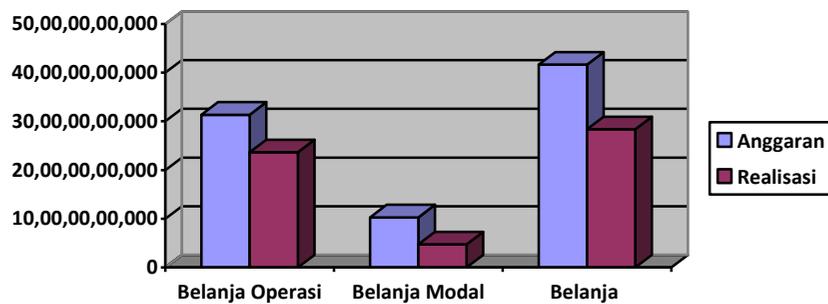
Realisasi Belanja Daerah Rp.28.391.089.333

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.28.391.089.333,- atau 68,16 % dari anggaran belanja sebesar Rp.41.652.146.291,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian dan Realisasi Belanja Tahun 2019

URAIAN	2019		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
Belanja Operasi	31.379.642.491	23.649.973.222	75,36
Belanja Modal	10.272.503.800	4.741.116.111	46,15
Total Belanja Daerah	41.652.146.291	28.391.089.333	68,16

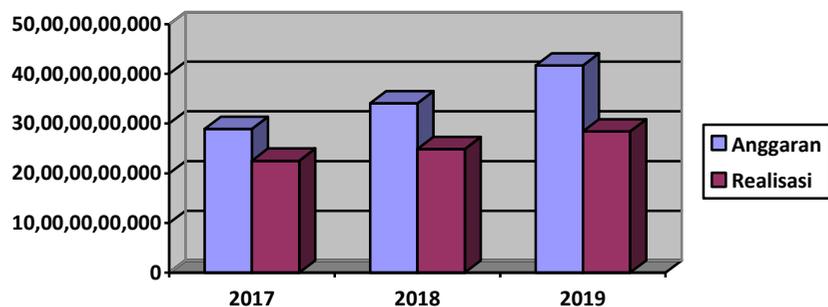
Grafik III. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis



Tabel 3. Realisasi Belanja Tahun 2019 Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 dan 2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentasi
2017	28.925.435.251	22.520.492.392	77,86%
2018	34.093.486.989	24.861.237.818	72,92%
2019	41.652.146.291	28.391.089.333	68,16%

Grafik IV. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 2017 dan 2018



<p><i>Belanja Pegawai</i> Rp.13.429.350.567</p>	<p>B.2.3. Belanja Pegawai</p> <p>Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.13.429.350.567,- atau 74,50% dan Rp.11.191.895.037,- atau 77,66%</p>
<p><i>Belanja Barang dan jasa Rp.</i> 10.220.622.655</p>	<p>B.2.4. Belanja Barang</p> <p>Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.10.220.622.655,- atau 76,53% dan Rp.12.738.406.059,- atau 75,62%</p>
<p><i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.</i> 2.325.778.760</p>	<p>B.2.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>Realisasi Belanja Modal peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.2.325.778.760,- atau 72,87% dan Rp.515.598.500,- atau 94,87%</p>
<p><i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i> Rp.818.180.351</p>	<p>B.2.6. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.818.180.351,- atau 30,19% dan Rp.0,- atau 0%</p>
<p><i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</i> Rp.1.134.344.000</p>	<p>B.2.7. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</p> <p>Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.134.344.000,- atau 41,04% dan Rp.339.112.222,- atau 78,86%</p>
<p><i>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i> Rp.462.813.000</p>	<p>B.2.8. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.462.813.000,- atau 28,78% dan Rp.76.226.000,- atau 17,34%</p>

B.3. Catatan Penting Lainnya

B.3.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk Tahun 2019 belum maksimal untuk mencapai target dikarenakan :

1. Perbaikan dan pengadaan Sarana dan Prasarana di BPI dilaksanakan di semester II Tahun 2019 sehingga mengganggu siklus produksi.
2. Belum Idealnya SDM yang ada di UPTD BPI dan UPTD PPI baik dari segi kuantitas maupun kualitas
3. Belum terakomodirnya beberapa potensi retribusi didalam Peraturan Daerah yang mengatur pungutan Retribusi di PPI
4. Belum diserahkannya PPI Sungai Batu Rusa oleh Kotamadya Pangkalpinang ke Provinsi kepulauan Bangka Belitung

B.3.2. Belanja

Realisasi Belanja untuk Tahun 2019 masih sangat kecil dikarenakan adanya kendala serta permasalahan yang dihadapi, terkait terhambatnya pencapaian target fisik dan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Dermaga Jetty pelaksanaan untuk DED Jetty di 4 lokasi sudah diadakan. Sementara untuk kegiatan fisik pembangunan dermaga jetty di Kurau tidak bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kegiatan perencanaan dan kegiatan fisik tidak bisa dilakukan dalam satu tahun anggaran apalagi untuk pekerjaan lelang. Karena akan berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan hanya terealisasi 62,7% hal ini disebabkan kurangnya anggaran makan minum dan tidak tersedianya uang saku peserta karena berlakunya system cost sharing untuk kegiatan Sosialisasi Asuransi Nelayan

3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan karena kegiatan Sosialisasi dengan output yang sama telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Batam dengan mengundang seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu kegiatan pendataan perikanan tangkap tidak dilaksanakan karena pendataan statistik perikanan tangkap sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan *One Data*.
4. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (DAK) yang bisa dilaksanakan hanya rehab drainase manggar, sumur bor di sungai selan gagal, karena s/d kedalaman 100m air masih payau, dan terjadi penurunan tanah.
5. Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK) hanya terealisasi 3 unit , 12 Tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan juknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Penyerapan kegiatan APBD Pengawasan Tindak Pidana kelautan dan Perikanan yang tidak terserap maksimal, hal tersebut dikarenakan tidak diakomodir/ditandatangani pengajuan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus penyidikan.
7. Adanya Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut) menyebabkan berkurang siklus produksi pembenihan dan pembesaran ikan sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran untuk pembelian bibit ternak, pakan ternak dan peralatan budidaya ikan

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan (asset, kewajiban dan ekuitas dana) pada tanggal tertentu. Asset diklasifikasikan menjadi asset lancar dan asset non lancar. Asset lancar terdiri dari kas atau asset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Asset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, asset tetap dan asset lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

Nilai Aset Neraca selama Tahun 2019 sebesar Rp.116.576.311.512,20,- yang berasal dari asset lancar Rp.361.967.523,73,- , asset tetap Rp.102.606.275.780,47,- , dan asset lainnya Rp.13.608.068.208,-

Untuk nilai kewajiban sebesar Rp.28.472.848.531,- sedangkan Ekuitas sebesar Rp.88.106.534.481,20,- sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp.116.579.383.012,20,-

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp.0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek Rp.
1.668.500,-

C.2.5. Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Pendek per 30 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.668.500,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing Wajib Retribusi. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	900.000	0,50%	4.500
Kurang Lancar	640.000	10%	64.000
Diragukan	3.200.000	50%	1.600.000
Macet	-	0%	-
Jumlah	4.740.000		1.668.500
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4.740.000		1.668.500

Beban Bayar di Muka
Rp. 0,-

C.2.6. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2018	TH 2017
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp. 361.967.523,73

C.2.7. Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 361.967.523,73 (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga koma Tujuh Puluh Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 Januari 2019, mutasi tambah dan mutasi kurang persediaan selama tahun 2019.

Saldo awal per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 517.349.090,40,- (*Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu*). Mutasi tambah persediaan sebesar Rp. 1.792.321.596,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) Sedangkan mutasi kurang persediaan sebesar Rp. 1.947.703.163,07,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Koma Nol Tujuh Rupiah*)

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp. 0,- (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp. 0,- (*Nol rupiah*). Adapun rincian barang persediaan yang masih tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2019	TH 2018
Bahan Kimia	1,00,000.00	1,08,21,500.00
Persediaan Alat Tulis Kantor	1,86,52,950.00	1,92,10,916.67
Barang Cetak	13,17,500.00	11,27,500.00
Bahan Bakar Minyak/Gas	3,00,000.00	39,52,000.00
Bahan Baku Bangunan	3,56,90,000.00	6,78,93,000.00
Obat-obatan	12,49,073.73	74,09,073.73
Bahan Makanan Pokok	7,85,02,000.00	14,21,05,000.00
Persediaan Isi Tabung Gas	1,65,000.00	1,65,000.00
Alat Listrik dan elektronik	40,06,000.00	35,16,000.00
Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	-	4,09,000.00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20,86,500.00	26,75,600.00
Bibit Ternak	21,98,98,500.00	25,80,64,500.00
Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-
Barang yg akan diberikan kepada pihak ketiga	-	-
Jumlah	36,19,67,523.73	51,73,49,090.40

Tanah

Rp. 1.577.661.184,-

C.2.8. Tanah

Saldo tanah pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.577.661.184,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Empat rupiah*). Saldo awal tanah per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 1.577.661.184,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Empat rupiah*). Pada tahun 2019 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap aset tanah.

Tabel 8. Posisi Tanah di Neraca Tahun anggaran 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	1,57,76,61,184.00	-	-	1,57,76,61,184.00
	Jumlah	1,57,76,61,184.00	-	-	1,57,76,61,184.00

C.2.9 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp. 42.050.577.034,80

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 42.050.577.034,80,- (*Empat Puluh Dua Miliar Lima Puluh Juta Lima ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Empat koma delapan puluh rupiah*). Saldo awal peralatan dan mesin per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 40.645.066.399,80,- (*Empat Puluh milyar Enam ratus Empat puluh Lima juta Enam puluh Enam ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh rupiah*). Mutasi Kurang dan mutasi Tambah atas aset peralatan dan mesin selama periode laporan masing-masing sebesar Rp. 1.064.996.225,- (*Satu Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima rupiah*) dan Rp. 2.470.506.860,- (*Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh rupiah*).

Untuk Mutasi kurang aset peralatan dan mesin, nilai mutasi kurang sebesar Rp. 1.064.996.225,- (*Satu Miliar Enam Puluh*

Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima rupiah). Mutasi tersebut disebabkan oleh adanya alih status asset (alat-alat angkutan) dari pengguna barang ke pengelola barang sebesar Rp. 929.401.900,- (*Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus rupiah*) dan Reklasifikasi Aset ke ekstrakomtable sebesar Rp.135.594.325,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) Sedangkan asset yang beralih status asset (alat-alat angkutan) dari pengguna barang ke pengelola barang adalah sebagai berikut:

Tabel 9.Peralatan dan mesin yang alih status ke pengelola barang

No	Nama Barang	Jumlah	Merk	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	Alat-alat angkutan				
	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Nissan Navara	1	38,88,51,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Pick Up	Toyota Hilux 2,5 G	1	38,05,75,900.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Jupiter MX 1	1	1,43,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Jupiter MX 1	1	1,43,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Jupiter MX 1	1	1,43,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	FD 110 Shogun	1	1,10,00,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	1,76,50,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	Sepeda Motor	Honda Mega Pro	1	1,76,75,000.00	KENDARAAN DINAS, MUTASI KE PENGELOLA, USULAN LELANG
	TOTAL			92,94,01,900.00	

Dengan adanya mutasi kurang pada aset peralatan dan mesin, maka nilai aset peralatan dan mesin pada neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Posisi aset peralatan dan mesin di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31	Mutasi	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Desember 2019
		Desember 2018	Tambah		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Alat-alat besar	3.391.240.863,32	-	0	3.391.240.863,32
2	Alat-alat Angkutan	17.294.221.603,83	-	936.781.900,00	16.357.439.703,83
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4.577.233.784,71	-	924.000,00	4.576.309.784,71
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4.033.859.138,33	-	1.254.000,00	4.032.605.138,33
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	6.841.057.440,61	-	98.026.200,00	6.743.031.240,61
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	812.623.250,00	-	-	812.623.250,00
7	Alat-alat Kedokteran	21.892.000,00	-	1.980.000,00	19.912.000,00
8	Alat-alat Laboratorium	3.441.236.819,00	-	26.030.125,00	3.415.206.694,00
9	Alat-alat Keamanan	231.701.500,00	-	-	231.701.500,00
					-
	Jumlah	40.645.066.399,80	-	1.064.996.225,00	39.580.070.174,80

C.2.10 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp.45.979.170.962,52

Saldo gedung dan bangunan pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 45.979.170.962,52,- (*Empat puluh lima milyar Sembilan ratus Tujuh puluh Sembilan juta Seratus Tujuh puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua koma lima puluh dua rupiah*). Saldo awal gedung dan bangunan per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 45.330.835.310,52,- (*Empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sepuluh koma lima puluh dua rupiah*). Mutasi tambah dan dan mutasi kurang atas aset gedung dan bangunan selama Tahun Anggaran 2019 masing-masing Rp. 648.335.652,- (*Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) dan Rp.0,- (*Nol Rupiah*)

Dengan adanya mutasi tambah aset gedung dan bangunan, maka posisi aset di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Posisi Gedung dan Bangunan di Neraca Tahun anggaran 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2017	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Gedung dan Bangunan	45.330.835.310,52	648.335.652,00	-	45.979.170.962,52
	Jumlah	45.330.835.310,52	648.335.652,00	-	45.979.170.962,52

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.63.504.763.330,15*

C.2.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi dan jaringan pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 63.504.763.330,15,- (*Enam puluh Tiga milyar Lima ratus Empat juta Tujuh ratus Enam puluh Tiga ribu Tiga ratus Tiga puluh koma lima belas rupiah*). Saldo awal jalan, irigasi dan jaringan per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 62.735.996.680,15,- (*Enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh koma lima belas rupiah*). Mutasi tambah dan dan mutasi kurang atas aset jalan, irigasi dan jaringan selama periode laporan masing-masing sebesar Rp.768.766.650,- (*Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) Rp. 0,- (*Nol rupiah*).

Dengan tidak adanya mutasi tambah dan mutasi kurang ini maka posisi jalan, irigasi dan jaringan di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Posisi aset jalan, irigasi dan jaringan di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Jalan dan Jembatan	12.999.468.574,00	199.845.000,00	-	13.199.313.574,00
2	Bangunan Air/Irigasi	46.077.631.742,97	553.884.750,00	-	46.631.516.492,97
3	Instalasi	1.794.861.713,18	-	-	1.794.861.713,18
4	Jaringan	1.864.034.650,00	15.036.900,00	-	1.879.071.550,00
	Jumlah	62.735.996.680,15	768.766.650,00	-	63.504.763.330,15

C.2.12. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp.1.867.155.259,-

Saldo aset tetap lainnya pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.867.155.259,- (*Satu milyar seratus delapan Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Lima Ribu Dua ratus lima puluh sembilan rupiah*). Saldo awal aset tetap lainnya per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 1.108.554.000,- (*Satu milyar seratus delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*). Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap lainnya pada Tahun Anggaran 2019 masing-masing sebesar Rp. 758.601.259,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dan Rp. 0,- (*Nol rupiah*).

Dengan adanya mutasi tambah ini maka aset tetap lainnya di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Posisi aset tetap lainnya di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Aset tetap lainnya	1,10,85,54,000.00	75,86,01,259.00	-	1,86,71,55,259.00
	Jumlah	1,10,85,54,000.00	75,86,01,259.00	-	1,86,71,55,259.00

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp.12.380.543.249,-

C.2.13. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.380.543.249,- (*Dua Belas milyar Tiga ratus Delapan puluh ribu Lima ratus Empat puluh Tiga ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan rupiah*). Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 9.379.707.300,- (*Sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*). Mutasi tambah dan mutasi kurang atas konstruksi dalam pengerjaan (KDP) selama periode laporan masing-masing sebesar Rp. 3.000.835.949,- (*Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan rupiah*) dan Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Dengan adanya mutasi ini, posisi aset konstruksi dalam pengerjaan di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Posisi aset KDP di neraca semester I tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)	9.379.707.300,00	3.000.835.949,00	-	12.380.543.249,00
	Jumlah	9.379.707.300,00	3.000.835.949,00	-	12.380.543.249,00

Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap Rp.(64.753.595.239)

C.2.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan kebijakan akuntansi atas penyusutan aset tetap sesuai masa manfaat masing-masing aset dengan menggunakan metode garis lurus.

Nilai penyusutan aset tetap pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 59.261.304.793,- (*Lima puluh Sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat*

ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah). Terdapat penambahan nilai penyusutan selama Tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 6.079.969.579,- (*Enam Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan rupiah*) dan pengurangan nilai penyusutan sebesar Rp. 587.679.133,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu seratus Tiga Puluh Tiga rupiah*) sehingga nilai penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 64.753.595.239,- (*Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan rupiah*).

Akumulasi penyusutan aset tetap dalam neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Posisi akumulasi penyusutan aset tetap di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Penyusutan tahun 2019		Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Akumulasi penyusutan aset tetap	59,26,13,04,793.00	6,07,99,69,579.00	58,76,79,133.00	64,75,35,95,239.00
	Jumlah	59,26,13,04,793.00	6,07,99,69,579.00	58,76,79,133.00	64,75,35,95,239.00

C.2.15. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Rp.13.608.068.208,-

Saldo aset lainnya pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 13.608.068.208,- (*Tiga belas milyar Enam ratus delapan juta Enam Puluh delapan Ribu Dua ratus delapan rupiah*). Saldo awal aset lainnya per 1 Januari 2019 sebesar Rp. 13.758.848.893,- (*Tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah*). Mutasi tambah dan dan mutasi kurang atas lainnya selama periode laporan masing-masing sebesar Rp. (150.780.685)Rp. 0,- (*Nol rupiah*) . Dengan adanya mutasi aset ini, maka posisi aset lainnya di neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Posisi aset lainnya di neraca tahun 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1	2	3	4	5
1	Aset Lainnya	13,75,88,48,893.00	(15,07,80,685.00)	-	13,60,80,68,208.00
	Jumlah	13,75,88,48,893.00	(15,07,80,685.00)	-	13,60,80,68,208.00

Utang Perhitungan
Pihak Ketiga
Rp. 0,-

C.2.16. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) dan Rp.0,- (*Nol rupiah*). Utang Perhitungan Pihak Ketiga tersebut terdiri dari :

Tabel 17. Posisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Semester I TA 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1	1	2	5
1	Utang PPh Psl 21	-	-
2	Utang PPh Psl 22	-	-
3	Utang PPh Psl 23	-	-
4	PPN	-	-
	Jumlah PFK	-	-

C.2.17. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima
di Muka Rp. 0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

C. 2.18. Utang Beban

Utang Beban
Rp.517.735.353,-

Nilai Utang Beban yang masih harus dibayar yang ditemukan pada neraca per 31 desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 517.735.353,- (*Lima Ratus*

Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dan Rp. 403.299.000,- (*Empat Ratus Tiga Ribu Dua ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah*) Utang Beban tersebut adalah Utang Beban Gaji Pegawai Sebesar Rp. 517.735.353,- (*Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*)

C.2.19. Ekuitas

Ekuitas

Rp.115.742.976.459,87

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.116.579.383.012,20,- (*Seratus Enam Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga ratus Delapan puluh tiga Ribu dua Belas Koma Dua Puluh Rupiah*) dan Rp.115.792.714.064,87,- (*Seratus Lima Belas Milyar Tujuh ratus Sembilan Puluh dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Enam Puluh Empat Koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

C3. CATATAN PENTING LAINNYA

C.3.1. BMD Ekstrakomptabel

Barang Milik Daerah Ekstrakomptable merupakan aset tetap yang mempunyai nilai dibawah kebijakan akuntansi. BMD ini diakui sebagai aset tetapi nilainya tidak disajikan dalam neraca. Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016, nilai aset tetap yang masuk pada asset ekstrakomptabel mengalami perubahan. Nilai BMD ekstrakomptable pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per **1 Januari 2019** sebesar **Rp.1.088.050.368,29** (*Satu milyar delapan puluh delapan juta lima puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah*). **Ada Mutasi Tambah** pada aset ekstrakomptabel selama per **31 Desember tahun anggaran 2019** sebesar **Rp. 135.594.325,-** (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima rupiah*)

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset ekstrakomptabel di Neraca 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 18. Posisi aset ekstrakomptabel di Neraca 31 Desember 2019

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 30 Juni 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BMD Ekstrakomptabel	1,08,80,50,368.29	13,55,94,325.00	-	1,22,36,44,693.29
	Jumlah	1,08,80,50,368.29	13,55,94,325.00	-	1,22,36,44,693.29

1. Barang Milik Daerah pada Laporan Barang Dinas dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per 31 Desember 2019.

a. BMD per akun neraca

Nilai BMD pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) per **31 Desember 2019** adalah sebesar **Rp. 116.576.311.512,-** (*Seratus Enam Belas Miliar Lima ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua belas rupiah*), Nilai BMD dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMD dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. BMD per akun Neraca

URAIAN NERACA	INTRA KOMPTABEL	EKSTRA KOMPTABEL	GABUNGAN
	Rp	Rp	Rp
2	3	4	5
ASET LANCAR	36,19,67,523.73	-	36,19,67,523.73
Persediaan	36,19,67,523.73	-	36,19,67,523.73
ASET TETAP	1,67,35,98,71,019.47	1,22,36,44,693.29	1,68,58,35,15,712.76
Tanah	1,57,76,61,184.00	-	1,57,76,61,184.00
Peralatan dan Mesin	42,05,05,77,034.80	-	42,05,05,77,034.80
Gedung dan Bangunan	45,97,91,70,962.52	-	45,97,91,70,962.52
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63,50,47,63,330.15	-	63,50,47,63,330.15
Aset Tetap Lainnya	1,86,71,55,259.00	-	1,86,71,55,259.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12,38,05,43,249.00	-	12,38,05,43,249.00
ASET LAINNYA	13,60,80,68,208.00	-	13,60,80,68,208.00
Aset Tidak Berwujud	4,83,74,89,850.00	-	4,83,74,89,850.00
Aset Lain-lain *)	12,26,36,07,100.00	-	12,26,36,07,100.00
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	(3,49,30,28,742.00)	-	(3,49,30,28,742.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(64,75,35,95,239.00)	-	(64,75,35,95,239.00)
Akumulasi Penyusutan aset tetap	(64,75,35,95,239.00)	-	(64,75,35,95,239.00)
TOTAL (I+II+III+IV)	1,16,57,63,11,512.20	1,22,36,44,693.29	1,17,79,99,56,205.49

- b. Perbandingan Nilai BMD pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan.

Perbandingan antara nilai BMD yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 31 Desember 2019 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 20. BMD di laporan barang dan laporan keuangan per 30 Desember Tahun 2019

NO	URAIAN NERACA	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Persediaan	36,19,67,523.73	36,19,67,523.73	-
2	Tanah	1,57,76,61,184.00	1,57,76,61,184.00	-
3	Peralatan dan Mesin	42,05,05,77,034.80	42,05,05,77,034.80	-
4	Gedung dan Bangunan	45,97,91,70,962.52	45,97,91,70,962.52	-
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63,50,47,63,330.15	63,50,47,63,330.15	-
6	Aset Tetap Lainnya	1,86,71,55,259.00	1,86,71,55,259.00	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12,38,05,43,249.00	12,38,05,43,249.00	-
8	Aset Tidak Berwujud	4,83,74,89,850.00	4,83,74,89,850.00	-
9	Aset Lain-lain *)	12,26,36,07,100.00	12,26,36,07,100.00	-
10	Akumulasi penyusutan + amortisasi aset tak berwujud	(68,24,66,23,981.00)	(68,24,66,23,981.00)	-
	TOTAL	1,16,57,63,11,512.20	1,16,57,63,11,512.20	-

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMD yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMD tersebut diatas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMD antara laporan barang dan laporan keuangan.

C.3.2. INFORMASI BMD LAINNYA

1. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMD.

Pelaksanaan penatausahaan BMD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak permasalahan antara lain:

- a. Aset dalam kelompok aset tanah masih ada yang luasnya 0 m² dan hal ini merupakan perhatian dalam pemeriksaan BPK. Beberapa asset yang luasan 0 m² ini telah ditindaklanjuti dan masih tersisa aset dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- Untuk aset senilai 1.000.000.000,- Berdasarkan dokumen sumber yang telah ditemukan diketahui bahwa asset tersebut merupakan reklamasi lahan PPI Pangkalpinang yang asset induknya milik pemerintah Kota Pangkalpinang. Saat ini sedang dilakukan proses hibah atas PPI Pangkalpinang ke provinsi. Jika PPI kota Pangkalpinang

diserahkan ke provinsi, maka nilai Rp. 1.000.000.000,- dapat dikapitalisasi ke asset induknya.

- b. Aset di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak yang belum dihapuskan sejak pengadaan tahun 2001;
- c. Aset-aset yang merupakan bantuan sosial untuk masih tercatat sebagai aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Beberapa aset dicatat dalam satu paket tanpa diketahui rincian asetnya;
- e. Dokumen pendukung atas aset (dokumen sumber) yang ada banyak yang belum ditemukan;
- f. Kartu inventaris ruangan tidak pernah selesai dibuat karena antara barang di SIMDA BMD berbeda dengan apa yang di lapangan dan barang sering dipindah-pindahkan dari ruangan tanpa memberi tahu kepada pengurus barang.
- g. Dan lain-lain

2. Langkah-

LangkahStrategisSebagaiAlternatifPenyelesaianMasalah.

Langkah-langkah strategis yang telah diambil dalam menyelesaikan masalah antara lain:

- a. Tetap melakukan penelusuran terhadap dokumen sumber baik hardcopy maupun softcopy
- b. Menertibkan pencatatan administrasi asset supaya lebih baik lagi

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.^[1]

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas:

- Pendapatan-LO
- Beban
- Transfer
- Pos Luar Biasa.

Tujuan

Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

1. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Periode Pelaporan

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Informasi yang Disajikan Dalam Laporan Operasional atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat

dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat:

1. timbulnya kewajiban;
2. terjadinya konsumsi aset;
3. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Metode garis lurus (straight line method);
2. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method);

3. Metode unit produksi (unit of production method).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

D.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan -LO
Rp.3.142.665.155,-

D.2.1. Pendapatan -LO

Realisasi pendapatan-LO Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.3.091.822.367,- (*Tiga Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah -LO sebesar Rp.149.672.100,-(*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam ratus Tujuh Puluh Dua Ribu seratus Rupiah*) dan Pendapatan Hibah-LO Sebesar Rp.2.942.150.267,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) sedangkan untuk periode per 31 Desember 2019 Realisasi pendapatan -LO adalah sebesar Rp.3.142.665.155,- (*Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam ratus enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima puluh Lima Rupiah*). Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp.440.715.460,- (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*) dan dari lain-lain PAD yang sah-LO Rp.695,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) serta dari Pendapatan Hibah - LO Rp.2.701.949.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Beban
Rp.
29.914.988.886,67,-

D.2.2. Beban

Beban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.30.582.868.300,33,- (*Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Koma Tiga Puluh Tiga*) yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp.13.604.494.037,- (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Empat Juta Empat ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) , Beban persediaan Rp. 3.822.387.814,33,- (*Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh*

Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah) Beban Jasa Rp.1.827.107.363,- (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) , Beban pemeliharaan Rp. 768.168.212,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) , Beban Perjalanan Dinas Rp. 2.520.356.415,- (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah) Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 8.040.354.459,- (Delapan Miliar Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) . Sehingga membuat surplus / defisit dari operasi sebesar Rp.(27.491.045.933,33) (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah) sedangkan untuk periode per 31 Desember 2019 Realisasi Beban adalah sebesar Rp.29.914.988.886,67,- (Dua Puluh Sembilan miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah). yang terdiri dari Beban Pegawai-LO sebesar Rp.14.045.786.920,-,- (Empat Belas Miliar Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) , Beban Persediaan Rp.2.563.275.289,67,- (Dua Miliar Lima ratus Enam Puluh Tiga Juta dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Tujuh rupiah) , Beban Jasa Rp.2.865.997.722,- (Dua Miliar delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) , Beban pemeliharaan Rp. 908.357.551,- (Sembilan Ratus delapan Juta Tiga ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima ratus lima Puluh Satu Rupiah) , beban Perjalanan Dinas Rp. 3.332.392.400,- (Tiga Miliar tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga ratus Sembilan Puluh Dua Ribu empat ratus Rupiah) ,Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 6.197.510.504,- (Enam Miliar

Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima ratus Empat Rupiah) dan Beban penyisihan Piutang Rp. 1.668.500,- (Satu Juta enam ratus Enam Puluh Delapan ribu Lima Ratus Rupiah) Sehingga membuat surplus / defisit dari operasi sebesar Rp.(26.772.323.731,67) *(Dua Puluh enam Miliar Tujuh ratus Tujuh Puluh Dua Juta tiga ratus Dua Puluh Tiga ribu Tujuh ratus Tiga Puluh satu Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah*

*Kegiatan Non
Operasional
Rp. 0,-*

D.2.3 Kegiatan Non Operasional

Semua Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2018 Rp.0,-. Sehingga Surplus /Defisit dari kegiatan Non Operasi sebesar Rp.0,- dan membuat surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.(27.491.045.933,33) *(Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah)* dan demikian pula untuk Semua Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2019 Rp.0,-. Sehingga Surplus /Defisit dari kegiatan Non Operasi sebesar Rp.0,- dan membuat surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.(26.772.323.731,67) *(Dua Puluh enam Miliar Tujuh ratus Tujuh Puluh Dua Juta tiga ratus Dua Puluh Tiga ribu Tujuh ratus Tiga Puluh satu Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah)*

D.2.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas dan untuk tahun 2018 ini adalah Rp.0,-. Sehingga Surplus /Defisit -LO Rp.(27.491.045.933,33) (*Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah*) sedangkan untuk Semua Pos luar biasa per 31 Desember 2019 Rp.0,-. Sehingga Surplus /Defisit dari kegiatan Non Operasi sebesar Rp.0,- dan membuat surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.(26.772.323.731,67) (*Dua Puluh enam Miliar Tujuh ratus Tujuh Puluh Dua Juta tiga ratus Dua Puluh Tiga ribu Tujuh ratus Tiga Puluh satu Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah*)

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Pada periode per 31 Desember 2019 Realisasi pendapatan -LO adalah sebesar Rp.3.142.665.155,- (*Tiga Miliar seratus Empat Puluh Dua Juta enam ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah*). Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp.440.715.460,- (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima belas Ribu Empat ratus Enam Puluh Rupiah*) dan dari lain-lain PAD yang sah-LO Rp.695,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dan Pendapatan Hibah-LO Rp. 2.701.949.000,- (*Dua Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

REKAPITULASI PENDAPATAN PER 31 DESEMBER 2019

No.	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI(Rp.)
1	PANGKALAN Pendaratan IKAN (PPI)	266.000.000	262.801.460
	1.KURAU		48.181.000
	2.SUNGAI SELAN		21.014.000
	3.SADAI		71.705.600
	4.SELAT NASIK		11.930.000
	5.MANGGAR		60.105.600

	6.GANTUNG		49.865.260
2	BALAI PEMULIAAN IKAN (BPI)	250.000.000	163.682.000
	1.BPI AIR PAYAU TJ.KRASAK		140.340.000
	2.BPI AIR LAUT TJ.RUSA		23.342.000
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.080.000	9.492.695
	1.SEWA KIOS FOTOCOPY		1.080.000
	2.JASA GIRO BANK		695
	3.SEWA ALAT SELAM		825.000
	4.PENGUJIAN LPPMHP		7.587.000
4	HIBAH PEMERINTAH PUSAT		2.701.949.000

E. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LPE

Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh instansi yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

Hal-hal yang terdapat dalam laporan perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

- Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
- Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam PSAK
- pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan perubahan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait,
- saldo akumulasi laba atau rugi pada awal ekuitas periode serta perubahannya

E.2. CATATAN PENTING LAINNYA

Ekuitas Awal
Rp.115.389.415.064,87

E.2.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Awal per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.115.389.415.064,87,-

Surplus(defisit) LO
(Rp. 26.772.323.731,67)

E.2.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO per 31 Desember 2019 adalah Rp.(26.772.323.731,67) Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Ekuitas Akhir
Rp.116.061.647.659,20

E.2.3 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.116.061.647.659,20,-

*Dampak Akumulatif
atas Perubahan Nilai
Akumulatif Penyusutan
Aset Tetap*
Rp.554.439.373,-

E.2.4 Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulatif Penyusutan Aset Tetap

Koreksi atas nilai perolehan aset tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan

keuangan dan di per 31 Desember 2019 ini ada dampak dari akumulatif perubahan nilai akumulatif penyusutan aset tetap sebesar Rp.554.439.373,-

*Dampak Akumulatif
atas Perubahan Nilai
Aset Tetap Peralatan
dan Mesin
Rp.(135.594.325)*

E.2.5 Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset tetap Peralatan dan Mesin di per 31 Desember 2019 ini sebesar Rp.(135.594.325),-

*Kewajiban Untuk
dikonsolidasikan
Rp.27.955.113.178,-*

E.2.6. Kewajiban Untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan di per 31 Desember 2019 ini sebesar Rp.27.955.113.178,-

*Koreksi Ekuitas lainnya
Rp.(929.401.900),-*

E.2.7. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya di per 31 Desember 2019 ini sebesar Rp.(929.401.900,-)

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

DASMINTO,S.PI,M.Si
NIP. 19661207 199503 1 001